

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dinamika hubungan internasional pada saat ini sangat menarik untuk diteliti karena cangkupan bahasannya yang semakin luas. Kajian mengenai bantuan luar negeri menjadi salah satu kajian yang banyak diteliti karena melibatkan dua negara atau lebih dalam meningkatkan pembangunan. Penelitian ini membahas *Peace Corps* sebagai badan pemerintah Amerika Serikat yang independen yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman bersama antara rakyat Amerika dan masyarakat dunia lainnya. *Peace Corps* juga memberi bantuan relawan yang terlatih untuk memberi bantuan dalam berbagai sektor. *Peace Corps* didirikan pada tahun 1961 dan telah melakukan kegiatan di lebih dari 70 negara dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, misalnya pemerintah, sekolah, pengusaha, institusi pendidikan dan kesehatan, jaringan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, teknologi informasi, pertanian, dan lingkungan hidup.

Program *Peace Corps* pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama melalui MoU yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963. Program ini kemudian berhenti pada tahun 1965. Pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membahas *Comprehensive Partnership* serta kesiapan Amerika Serikat untuk

mengirimkan kembali *Peace Corps* ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menanggapi hal ini secara positif. Melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, *Memorandum of Understanding (MoU) Peace Corps* akhirnya ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan dokumen *Implementing Arrangement (IA)* atau pengaturan pelaksanaan program telah ditandatangani masing-masing oleh *Peace Corps* dan Kementerian Pendidikan Nasional (kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kementerian Agama pada tanggal 15 Juni 2011.

Program *Peace Corps* juga merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka *Comprehensive Partnership* antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama. Melalui program *Peace Corps*, pemerintah Amerika Serikat lewat *Peace Corps* mengirimkan relawan-relawannya ke Indonesia untuk mempererat hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia melalui pengajaran Bahasa Inggris di sekolah/madrasah (*people to people contact*)

Sejak tahun 2010, Program *Peace Corps* Indonesia berkontribusi di bidang pendidikan khususnya pendidikan Bahasa Inggris, dimana para relawan *Peace Corps* memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada murid sekolah menengah dan madrasah aliyah di Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2012, kegiatan *Peace Corps* mulai dikembangkan ke provinsi lain, yaitu ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, mulai tahun

2012 *Peace Corps* tidak hanya memberikan pelatihan Bahasa Inggris di SMA dan MAN, namun juga di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurut Bappenas, Indonesia mengharapkan kerjasama dengan *Peace Corps* dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam *Paris Declaration* dan *the Jakarta Commitment*.

Paris Declaration on Aid Effectiveness merupakan sebuah upaya bersama negara-negara dunia untuk menetapkan indikator-indikator pengukuran keefektivitasan suatu bantuan luar negeri. Di Indonesia diteruskan dengan dibentuknya *Jakarta Commitment* yang menekankan keikutsertaan Indonesia menjadi negara yang mendukung keefektivitasan bantuan luar negeri.

Aktifitas bantuan luar negeri yang dilakukan oleh *Peace Corps*, berdasarkan prinsip-prinsip dan indikator-indikator *Paris Declaration on Aid Effectiveness*, peneliti menemukan bahwa dari prinsip kepemilikan kebijakan, perencanaan dan strategi pemerintah Indonesia sudah ada dan berjalan, dengan adanya RPJP, RPJM dan RSKP. Namun untuk RSKP, dalam usaha pembangunan pendidikan, pengajaran Bahasa Inggris belum menjadi prioritas utama.

Prinsip keselarasan lokal memperlihatkan koordinasi yang baik antara pihak *Peace Corps* dengan pihak pemerintahan Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Baiknya koordinasi dicapai karena sudah ada pembagian tugas dan

tanggung jawab serta alur koordinasi yang yang jelas. Prioritas nasional Indonesia memang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program *Peace Corps*. Relawan mengabdikan dirinya untuk pembangunan Indonesia khususnya peningkatan pendidikan. *Conditionalities* yang diberikan kedua pihak cukup banyak, namun persyaratan dan kewajibannya dijelaskan secara jelas.

Dari prinsip harmonisasi, pemerintah melalui Bappenas dengan *Peace Corps* memiliki harmonisasi yang baik. Motif dan kepentingan dapat dijalankan kedua pihak dengan baik. Dari prinsip pengelolaan yang berbasis hasil pembangunan, sejak tahun 2010 jumlah siswa, guru dan masyarakat yang berinteraksi dan merasakan bantuan pembangunan yang diberikan *Peace Corps* terus meningkat. Dari prinsip pertanggungjawaban bersama, mekanisme pelaporan antara pemerintah dan *Peace Corps* sudah ada dan diterbitkan secara berkala. Proses monitoring dan evaluasi juga dilakukan pemerintah lewat Bappenas.

Dari prinsip dan indikator yang dihasilkan oleh *Paris Declaration*, dapat dilihat bahwa aktifitas yang dilakukan *Peace Corps* sudah cukup efektif pada Prinsip Keselarasan Lokal, Prinsip Harmonisasi dan Prinsip Pertanggungjawaban Bersama, hanya ada kekurangan di Prinsip Kepemilikan Kebijakan dan Prinsip Pengelolaan yang Berorientasi Pada Hasil Pembangunan. Pada Prinsip Kepemilikan Kebijakan, RSKP (Rencana Strategis Kementerian Pendidikan) dalam usaha pembangunan pendidikan, pengajaran Bahasa Inggris belum menjadi prioritas utama. Adanya perbedaan rancangan pembangunan dengan yang dilakukan di lapangan membuat strategi yang dilakukan belum operasional. Pada Prinsip Pengelolaan yang

Berorientasi Pada Hasil Pembangunan, sejak tahun 2010 jumlah siswa, guru dan masyarakat yang berinteraksi dan merasakan bantuan pembangunan yang diberikan *Peace Corps* terus meningkat namun tidak ada kerangka kerja yang berorientasi pada hasil-hasil pembangunan.

1.1 Saran

Penelitian ini melihat efektivitas bantuan pembangunan *Peace Corps* yang diterima Indonesia dengan prinsip dan indikator yang dihasilkan oleh *Paris Declaration on Aid Effectiveness*. Meskipun ada beberapa indikator yang tidak ditemukan karena keterbatasan data beberapa pihak terkait keefektivitasan bantuan luar negeri. Karena ketika berbicara mengenai keefektivitasan, sangat perlu untuk mengetahui upaya-upaya yang memang dilakukan oleh badan bantuan dan hubungannya dengan negara penerima bantuan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa kajian mengenai efektivitas bantuan yang diberikan *Peace Corps* kepada Indonesia dapat menjadi acuan dalam mengkaji keefektivitasan badan bantuan lainnya yang diterima Indonesia. Sehingga upaya pembangunan yang menjadi tujuan hampir semua negara dapat dijalankan dengan efektif. Dari sisi dinamika topik, disarankan penelitian yang mengembangkan bahasan hubungan *Peace Corps* dengan Kementerian Luar Negeri, karena berakhirnya kerjasama *Peace Corps* dengan Kementerian PPN/Bappenas.